



► KENAIKAN GAS NONSUBSIDI

# Hotel & Restoran Siapkan Strategi Efisiensi

**UMBULHARJO**—Pelaku wisata di Kota Jogja bersiap menghadapi tekanan baru seiring naiknya harga elpiji dan BBM nonsubsidi. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mulai menyusun langkah strategis untuk menekan biaya operasional di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

Stefani Yulindriani  
stefani@harianjogja.com

Wakil Sekretaris PHRI DIY, Wahyu Wikan Trisratiwi, mengungkapkan kenaikan harga elpiji dan BBM nonsubsidi berpotensi memicu efek domino pada rantai pasokan, terutama dari sisi distribusi bahan baku.

Menurutnya, biaya logistik diperkirakan meningkat, khususnya untuk pengangkutan sayur mayur dan bahan pangan lain yang dipasok dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kondisi ini dapat berimbas langsung pada struktur biaya pelaku usaha, baik di sektor perhotelan maupun restoran.

Di sisi lain, pelaku usaha menghadapi dilema dalam menentukan harga jual. Kenaikan harga makanan dinilai berisiko menurunkan minat konsumen, terutama setelah periode Lebaran yang biasanya menguras pengeluaran. "Daya beli masyarakat masih lesu setelah Lebaran. Meski makan adalah kebutuhan pokok, frekuensi masyarakat untuk makan di luar mulai berkurang," ujarnya, Senin (20/4).

Untuk menjaga keberlangsungan

► Kenaikan harga elpiji dan BBM nonsubsidi berpotensi memicu efek domino pada rantai pasokan bahan baku.

► Pelaku industri menyiapkan strategi efisiensi, salah satunya beralih ke penggunaan gas alam yang lebih hemat.

**Fokusnya [WFH] untuk pegawai non-pelayanan langsung. Dengan sebagian ASN bekerja dari rumah, harapannya terjadi efisiensi penggunaan BBM secara signifikan.**

**Sinarbiyat Nurjanat**  
Wakil Ketua DPRD Kota Jogja

usaha, pelaku industri mulai menyiapkan strategi efisiensi, salah satunya beralih ke penggunaan gas alam yang dinilai lebih hemat dibandingkan elpiji.

Selain itu, pelaku usaha juga mencari alternatif pemasok bahan baku dengan harga lebih stabil, dan menyesuaikan komposisi menu maupun porsi tanpa mengurangi kualitas rasa.

Dijelaskan Wahyu, hingga saat ini dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi belum terasa khususnya pada okupansi hotel. "Kami masih memantau di bulan Mei [2026], apakah rangkaian *long weekend* akan mendatangkan banyak wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi atau tidak," katanya.

**Perluasan WFH**

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota

Jogja, Sinarbiyat Nurjanat, mendorong Pemkot Jogja untuk mengoptimalkan kebijakan *work from home* (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah efisiensi di tengah tekanan ekonomi global.

Menurut Sinarbiyat, meski kenaikan harga BBM lebih menasar sektor nonsubsidi yang umumnya digunakan kendaraan pribadi, upaya antisipasi tetap diperlukan. Dia menilai skema WFH dapat diperluas, khususnya bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. "Fokusnya [WFH] untuk pegawai non-pelayanan langsung. Dengan sebagian ASN bekerja dari rumah, harapannya terjadi efisiensi penggunaan BBM secara signifikan," ujarnya, Senin.

Sinarbiyat juga mendorong Pemkot Jogja memperketat penggunaan kendaraan dinas melalui sistem pembatasan kuota BBM di setiap OPD.

"Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja, Sarwanto, mengungkapkan realisasi WFH di Pemkot Jogja masih rendah.

Dari total 7.115 ASN, baru 42 orang atau sekitar 0,59% yang menjalankan WFH. Kebijakan ini baru diterapkan di lima OPD, yakni Badan Kesbangpol, Bagian Organisasi, Bappeda, BKPSDM, serta Kemantren Gondomanan. Meski begitu, Sarwanto menegaskan penerapan WFH tetap disertai pengawasan ketat dan berjenjang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005